

REPOSITIONING THE ROLE OF COMMUNITY ORGANIZATIONS: INVESTIGATING GOOD CITIZENSHIP IN PANCASILA YOUTH.

Alvina Nopita Sari; Wibowo Heru Prasetyo

**Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan
Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bentuk implementasi good citizen di Organisasi Pemuda Pancasila. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, yaitu metode dengan menggambarkan bagaimana kondisi dan fenomena yang sebenarnya terjadi, kemudian dijelaskan dalam laporan penelitian. Subyek dalam penelitian ini meliputi Wakil Ketua Pemuda Pancasila Sukoharjo dan anggota Pemuda Pancasila Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan triangulasi sumber. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis model aliran Miles dan Hubberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah salah satu wujud penerapan kewarganegaraan yang baik pada Pemuda Pancasila adalah Organisasi Pemuda Pancasila meliputi warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang baik melalui berbagai kegiatan positif dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Kata Kunci: (Pemuda Pancasila, Kewarganegaraan yang Baik, Sosial Budaya).

Abstract

This study discusses the form of good citizenship implementation in the Pancasila Youth Organization. This research method uses qualitative research with a type of case study, namely a method by describing how conditions and phenomena actually occur, then explained in the research report. Subjects in this study included vice chairman of Pemuda Pancasila Sukoharjo and Pemuda Pancasila Sukoharjo members. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. Data validity tests are carried out by triangulation techniques and source triangulation. The research data was analyzed using flow model analysis techniques by Miles and Hubberman consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study are a form of good citizenship implementation in Pancasila Youth is the Pancasila Youth Organization including citizens who are responsible and actively participate as good citizens through various positive activities and carry out their obligations as Indonesian citizens.

Keywords: (Pemuda Pancasila, Good Citizenship, Social Culture).

1. PENDAHULUAN

Organisasi merupakan sebuah identitas dari suatu tempat yang terdapat beberapa orang berkumpul dan memiliki tujuan untuk dicapai. Ormas (Organisasi Masyarakat) memiliki peranan cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam membantu menyuarkan hak atau tuntutan mereka, membentuk suatu kebijakan pemerintah maupun mitra

dalam bekerjasama, ikut berpartisipasi dalam memantau suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan pemerintah (Probosiwi, 2018). Tujuan dari adanya Ormas ialah mengidentifikasi adanya permasalahan yang ada di masyarakat, mengikuti isu yang sedang berkembang dan ikut memberikan solusi, menghidupkan kelompok-kelompok masyarakat dan sebagai wadah pembantu yang bersifat independen non-pemerintah dalam menyediakan forum untuk bertukar ide maupun informasi terkini. Kebebasan berkumpul dan berpendapat diakui dan diatur dengan Undang-undang 1945 pasal 28E sehingga ormas mempunyai ruang lingkup yang bersifat Nasional, daerah yang membebaskan siapa saja untuk bergabung tidak membedakan keberadaan wilayah negara Indonesia baik itu berada di pusat kota sampai pelosok negeri.

Sejak Era Reformasi tahun 1998, Indonesia merubah sistem ketatanegaraan dan sistem kemasyarakatan hingga menimbulkan efek adanya perubahan Organisasi Masyarakat yang ada sebelum dan sesudah reformasi (Palinggi & Prayogyandarini, 2020). Adanya perubahan tersebut, terbentuklah berbagai perkumpulan mengatasnamakan organisasi masyarakat yang banyak di temui hingga sekarang, baik bersifat politik, agama hingga sosial-masyarakat. Organisasi Masyarakat tersebut memiliki ciri khas tertentu dalam menjalankan organisasinya, hal ini memberikan dampak cukup besar terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat banyak Organisasi yang ada di Indonesia dan diakui keberadaannya seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Indonesia Aids Coalition (IAC), Pemuda Pancasila (PP), Lembaga Anak Bangsa (LAB), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Cinta Bangsa (YCB), d (Erick dkk., 2016) ll.

Organisasi Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Pemuda Pancasila) berdiri pada 28 Oktober 1959 merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dai Jakarta. Sebelumnya Pemuda Pancasila merupakan pengembangan dari organisasi politik sebelum masa reformasi yang disebut dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), tokoh pendiri dari IPKI yang kemudian berubah menjadi Pemuda Pancasila ialah A. Yani, A.H. Nasution, dan Gatot Subroto. Tokoh tersebut merupakan pendiri yang tidak langsung terjun dalam permainan politik saat itu karena adanya larangan dari anggota militer untuk tidak berpartisipasi politik secara langsung. IPKI pada saat itu mengemban tugasnya dalam melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bahasanpolitik komunis yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) (Martono, 2017).

Anggota dari Pemuda Pancasila berciri patriotik, militan, persaudaraan, inovatif, kreatif dan terbuka tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, ras, agama, golongan, profesi maupun

status sosial, golongan serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Didalam peraturan organisasi pemuda nomor 001/PO/MPN-PP/1/2002 tentang musyawarah-musyawarah organisasi pemuda pancasila, semboyan Semboyan dari Pemuda Pancasila ialah “PANCASILA ABADI” dan “SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG” yang artinya jika sudah di mulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi. Pemuda Pancasila merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah berdiri sejak orde lama dan masih memperlihatkan eksistensinya kepada masyarakat Indonesia dan menjadikan pancasila sebagai ideologi tunggal organisasi.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (dalam Ii, 2009) persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur peninjauan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk menyusun, dan kemampuan untuk mendasarkan. Maka dari itu, setiap individu bisa saja memiliki persepsi yang berbeda walaupun dalam satu objek yang sama. Hal tersebut terjadi karena, perbedaan dalam memberikan penilaian dan ciri kepribadian seseorang. Sedangkan menurut Leavit (Ii, 2009) persepsi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, persepsi yaitu pandangan dari individu dalam memandang sesuatu, dalam arti luas persepsi merupakan pengamatan bagaimana seseorang mengamati suatu hal. Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan dari pengamatan yang diterima dari panca indra dan disimpulkan oleh stimulus untuk menilai suatu hal atau objek.

Pemuda Pancasila sering melakukan kegiatan sosial, politik dilingkungan masyarakat hampir setiap bulannya (Slametto, 2016). Kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat mulai paham akan adanya tujuan Pemuda Pancasila yang berlainan adanya tindakan premanisme sehingga dibutuhkannya perubahan persepsi dari masyarakat. Bentuk tindakan pendekatan Pemuda Pancasila ialah dengan menghilangkan bentuk atau aksi premanisme dalam lingkungan masyarakat. Namun, masih terdapat pro-kontra dengan adanya Pemuda Pancasila karena sudah melekatnya persepsi masyarakat yang kurang baik di kalangan masyarakat (Syahputra, 2019). Hal ini terjadi karena masih terdapat oknum anggota Pemuda Pancasila yang melakukan aksi premanisme hingga pemalakan yang membuat masyarakat merasa terganggu dengan aktifitas-aktifitas tersebut. Kenyataan diluar persepsi masyarakat mengenai pemuda pancasila, dibutuhkan adanya kesadaran dari anggota organisasi tersebut dalam mewujudkan kewarganegaraan yang baik sesuai dengan peraturan dan tujuan dibentuknya.

Pemuda Pancasila selain bertujuan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ikut serta menjaga pertahanan negara, Pemuda Pancasila memiliki pengaruh terhadap partai politik

hingga pesta demokrasi. Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam Pesta demokrasi merupakan instrumen lain selain partai politik dalam fungsi mobilisasi massa (Fariz, 2015). Adanya Pemuda Pancasila sering dimanfaatkan untuk mengumpulkan massa dari *internal* anggota maupun *eksternal* anggota Pemuda Pancasila. Hal ini dikarenakan Organisasi Masyarakat dianggap memiliki peran dalam kehidupan sosial dan mempunyai pengaruh dalam memberikan massa kepada calon kepala daerah dalam pesta demokrasi. Peran Organisasi Masyarakat dalam pesta demokrasi yang berhubungan erat dengan politik, karena dianggap mampu membantu penyalur aspirasi masyarakat sebagaimana tujuan dari Pemuda Pancasila itu sendiri yang dilakukan dengan cara musyawarah, demonstrasi, hubungan pribadi maupun perwakilan dalam memberikan aspirasi. Selain itu Pemuda Pancasila juga dapat berperan sebagai pengalihan isu politik yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan saat pemilihan berlangsung (Slametto, 2016). Pemuda Pancasila di Kabupaten Sukoharjo memiliki peran sendiri dalam bidang politik yang terlihat dari berbagai pandangan yang berdasarkan pada ideologi pancasila dengan memberikan program kepada masyarakat (Sagala, 2018).

Pemuda Pancasila dalam perannya sebagai Organisasi Masyarakat sering dilibatkan dalam dunia politik. Terlihat dari terlibatnya Pemuda Pancasila di dalam pesta demokrasi seperti pemilu maupun pilkada. Pemuda Pancasila keterlibatannya digunakan oleh partai politik maupun calon kepala daerah sebagai alat mobilisasi penggerak massa dari kader Pemuda Pancasila untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon yang terlibat. Tak jarang anggota maupun pengurus dari Pemuda Pancasila dilibatkan sebagai calon kepala daerah dan diusung oleh partai tertentu sebagai keputusan organisasi dan kepentingan elit yang ada di daerah tersebut (Yando dkk., 2019).



Gambar 1. Sosialisasi penguatan karakter anggota Pemuda Pancasila

Sumber : Dokumentasi Humas Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo

Keterlibatan tokoh politik dalam Pemuda Pancasila di Sukoharjo terlihat pada acara-acara yang diselenggarakan Pemuda Pancasila maupun pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran tokoh politik yang terlihat dari gambar diatas salah satunya adalah Bupati Kabupaten

Sukoharjo Hj. Etik Suryani, SE., MM yang hadir pada saat acara sosialisasi penguatan karakter anggota Pemuda Pancasila di Langenharjo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Hal ini memperkuat adanya pengaruh dari Pemuda Pancasila dalam keterlibatannya di lingkungan politik maupun pemerintah, keduanya saling berkeatain dengan tujuan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo. Penelitian ini berkaitan dengan Progdi PPKn yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik (*good citizenship*) dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keorganisasian masyarakat serta memberi gambaran mengenai karakter yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual maupun rasa cinta kepada tanah air.

Selain peran Pemuda Pancasila terhadap politik, seringkali Pemuda Pancasila diisukan dengan berita yang kurang baik antaranya, pedagang adu mulut dengan sejumlah pria yang di antaranya berbaju ormas Pemuda Pancasila (PP) viral di media sosial. Cekcok itu terjadi karena para pria itu melakukan pungli dengan kedok uang keamanan (DetikSumut, 2023). Sekelompok oknum anggota ormas yang diduga kuat telah melakukan kekerasan dan tindakan intervensi terhadap dua wartawan bahkan salah satu di antara dua wartawan tersebut dihadaahi bogem mentah oleh salah satu anggota oknum ormas tersebut, terekam dalam video berdurasi 2 menit 42 detik dengan jelas bahwa oknum anggota ormas melayangkan bogem mentah kepada wartawan (Tabloid Pilar Post, 2021). Sejumlah pria berpakaian baju ormas, diduga melakukan pungutan liar terhadap sejumlah pedagang di Pasar Seni Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang (Tribun Medan, 2022). Dengan paparan tersebut, permasalahannya adalah persoalan mengenai beberapa oknum dari Ormas Pemuda Pancasila yang melakukan pungutan liar serta melakukan kekerasan. Permasalahan tersebut telah ditangani dan diberikan sanksi dengan adanya pemberhentian secara tidak hormat kepada oknum yang melakukan kriminalitas.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari aspek penguatan karakter dan pembentukan warga negara yang baik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk *smart and good citizen* atau kewarganegaraan yang cerdas dan baik. Kehadiran Ormas seperti Pemuda Pancasila menjadi wujud partisipasi elemen masyarakat untuk memberikan kaderisasi kepemimpinan. Hasil dari riset ini diharapkan memberi sumbangsih gagasan dan praktik empiris yang dapat menjadi tambahan kajian untuk memahami, mengerti dan menanamkan nilai-nilai ideologi pada dirinya sebagai bekal hidup di masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Mahasiswa sebagai generasi muda pembawa perubahan bangsa ini yang akan mengabdikan dimasyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing harus

memiliki pemahaman ideologi yang mendalam sehingga dia tidak meninggalkan jati diri bangsanya ditengah-tengah masyarakat global.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Apa Pandangan anggota terhadap reposisi Organisasi Pemuda Pancasila berkaitan dengan konsep kewarganegaraan yang baik?; 2) Bagaimana bentuk implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila?; 3) Apa kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila?; 4) Apa solusi dari kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila?.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2007), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil akhirnya merupakan deskripsi berupa kalimat dan tidak menggunakan prosedur angka yang dilakukan secara natural hingga mendapatkan data yang valid. Fokus utama dari penelitian ini ialah organisasi pemuda Pancasila yang berada dalam sebuah lembaga organisasi masyarakat. Penggunaan pendekatan kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. (Creswell, 2007).

“Metode kualitatif merupakan salah satu jenis metode yang menggambarkan, mencari tahu dan memahami dari suatu maupun kelompok orang yang berasal dari suatu fenomena sosial.”

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena objek yang diteliti memiliki kecenderungan sosial masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan sehingga peneliti dapat memahami subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Fokus utama dari penelitian ini adalah peran Organisasi Pemuda Pancasila pada kewarganegaraan yang baik di lingkungan masyarakat. Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif agar dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti dapat memahami dan menggambarkan apa saja yang dilakukan dan dilaksanakan oleh subjek peneliti.

Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus, Studi Kasus merupakan suatu hasil susunan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tercatat dan mendalam mengenai suatu kebijakan, peristiwa, kegiatan, baik pada suatu individu, kelompok, atau organisasi (Mudjia Rahardjo, 2017). Tempat penelitian ini berada di Markas Organisasi Pemuda Pancasila Sukoharjo yang berada di Langenharjo, kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Objek penelitian adalah suatu hal yang akan digunakan saat penelitian guna

mendapatkan tujuan dari mencari jawaban tertentu yang harus saling berhubungan dan tidak terpisahkan dari peneliti (Andhini, 2017) Objek penelitian kali ini adalah membahas pokok dari permasalahan yang akan diteliti agar mendapatkan data secara lebih terarah dan teratur. Subjek dari penelitian ini adalah anggota dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Dalam deskripsi hasil penelitian ini menjelaskan mengenai keadaan Organisasi Pemuda Pancasila (PP). Dalam deskripsi lokasi ini memuat mengenai profil Organisasi Pemuda Pancasila, data anggota Organisasi Pemuda Pancasila. Untuk penjelasan secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Sejarah singkat Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo. Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959, sejak tahun 1981 dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Organisasi ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi (preman) yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi negara Indonesia. Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam mendukung kudeta militer Suharto pada tahun 1965: mereka menjadi pasukan kematian bagi tentara Indonesia, menewaskan satu juta atau lebih yang dituduh komunis dan Tionghoa-Indonesia di seluruh Provinsi Sumatra Utara, seperti yang dijelaskan dalam film dokumenter Jagal 2012.

Saat itu dinyatakan bahwa organisasi saat ini memiliki tiga juta anggota. Perkiraan keanggotaan nasional dari akhir 1990-an berkisar 4-10.000.000 orang. Sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, sekitar tahun 1965 ketika PKI gencar menelusup di segenap sendi kehidupan masyarakat, kerap berhadapan secara fisik dengan anggota Pemuda Pancasila. Sejarah mencatat beberapa kali terjadi bentrokan fisik yang menewaskan anggota organisasi dari kedua belah pihak. Kegiatan organisasi ini lebih dititik beratkan untuk bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat hingga ke tingkat basis dengan jutaan anggota Pemuda Pancasila yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Organisasi Pemuda Pancasila juga eksis dalam dinamika organisasi di tingkat nasional (Majelis Pimpinan Nasional), provinsi (Majelis Pimpinan Wilayah), kota/kabupaten (Majelis Pimpinan

Cabang), kecamatan (Pimpinan Anak Cabang), hingga kader di kelurahan sebagai akar rumput atau basis massa terbawah. Pemuda Pancasila juga mengedepankan unsur keberagaman seperti, pendidikan, sosial ekonomi, usia, suku, dan agama. Ikrar Pemuda Pancasila. Berikut ikrar Pemuda Pancasila:

- 1) Bertanah Air satu, Tanah Air Indonesia
- 2) Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia
- 3) Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia

Tahun 1990 Kabupaten Sukoharjo bergabung dalam kegiatan Organisasi Pemuda Pancasila dengan sebutan MPC (Majelis Pimpinan Cabang) Kabupaten Sukoharjo, pada saat itu anggota dari MPC PP hanyalah 10 orang hingga berkembang sampai dengan saat ini menjadi 120 anggota yang di ketuai oleh Nur Setyo SH. MH. Kegiatan MPC PP Sukoharjo saat ini berfokus pada kepentingan masyarakat, sosial dan politik.

3.1.2 Gambaran umum Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo. MPC PP Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu anak cabang dari organisasi Pemuda Pancasila yang berada di wilayah Sukoharjo. Markas dari MPC PP Kabupaten Sukoharjo berada di desa Langenharjo, Baki, Kabupaten Sukoharjo. Anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo beranggotakan 120 anggota, yang terdiri dari satuan pelajar dan mahasiswa (SAPMA), masyarakat umum dan dari kalangan pemerintahan.

Dalam mencapai tujuan baik dari sebuah organisasi maupun perusahaan, maka perlu adanya visi dan misi dari organisasi tersebut. Menjadi terdepan sebagai kaum intelektual Pemuda Pancasila dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan demi esensi dan eksistensi Sapma Pemuda Pancasila Di Jawa Tengah Pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Misi dari MPC Kabupaten Sukoharjo ialah a) Menggunakan segala kemampuan dan potensi diri sebagai kaum intelektual untuk memberikan yang terbaik bagi Pemuda Pancasila, bangsa dan Negara. b) Pemahaman mendalam dan implementasi nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila (sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara) untuk diri sendiri maupun orang lain dengan atau melalui lembaga Pemuda Pancasila. c) Mempererat kebersamaan dan persaudaraan antara sesama anggota keluarga besar Pemuda Pancasila sehingga tercipta suasana internal dan eksternal yang menunjang jalannya lembaga dalam mencapai tujuan. d) Berjuang dan terus berkarya demi Pemuda Pancasila terutama kebesaran dan nama baik Pemuda Pancasila. e) Mengadakan pembinaan untuk para pengurus dan anggota dalam sistem kinerja dan manajemen organisasi yang termotivasi, transparan, jujur, tertata, disiplin. f)

Melebarkan sayap lembaga Pemuda Pancasila Jawa Tengah dengan mendirikan pengurus cabang di setiap kabupaten.

3.1.3 *Data aktif anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo.* Jumlah anggota MPC Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 yaitu 120 anggota, secara rinci anggota MPC Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data aktif anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo

No	Bidang	Jumlah
1)	SAPMA PP	35
2)	SRIKANDI PP	10
3)	MASYARAKAT UMUM	75

(Sumber: dokumentasi MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo)

3.2 Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Maka selanjutnya data dianalisis untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah terkait berkaitan dengan Progdi PPKn yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik (*good citizenship*) dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keorganisasian masyarakat serta memberi gambaran mengenai karakter yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual maupun rasa cinta kepada tanah air yang terfokus pada Ormas (Organisasi Masyarakat) Organisasi Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Pemuda Pancasila). Data tersebut dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari data yang telah terkumpul dipaparkan sebagai berikut:

3.2.1 *pandangan anggota terhadap reposisi Organisasi Pemuda Pancasila berkaitan dengan konsep kewarganegaraan yang baik.*

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 15 November 2023, mengatakan bahwa:

“pandangan masyarakat terhadap kegiatan, selama ini baik-baik saja sebagian juga mendukung kegiatan kami dengan memberikan izin dan ikut membantu, selama di Sukoharjo belum menemui permasalahan yang pasti jika berhadapan dengan masyarakat, tapi kalo melihat di internet di berita kebanyakan ada yang memberitakan kurang enak tapi menurut kami itu hanya oknum dan jika terbukti dari Pemuda Pancasila setempat akan dihentikan dan di beri sanksi jika melakukan tindakan anarkis.”

Pendapat ini selaras lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 15 November 2023, mengatakan bahwa:

“kalo pandangan masyarakat umum yang ada di Sukoharjo menerima dengan baik kegiatan-kegiatan kami mba, karena kami juga datang dan baik dan tujuan kegiatan kami pun untuk masyarakat jadi masyarakat dapat menerima kegiatan kami selama ini”

“pandangan masyarakat umum di internet ya kami biarkan saja jika tidak berkaitan dengan Pemuda Pancasila di Sukoharjo, tapi mba kalo yang di berita kan itu kami pasti adakan evaluasi, di terima pendapat masyarakat dan kami perbaiki.”

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPC PP Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya dukungan positif dengan memberikan izin dan ikut serta membantu pelaksanaan kegiatan.

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu, 15 November 2023, mengatakan bahwa:

“menurut saya pribadi sebagai wakil ketua MPC PP Kabupaten Sukoharjo menanggapi berbagai macam berita ada yang negatif ada yang positif, ya saya tanggapi dengan baik jika ada pandangan kurang baik terhadap kami ya sampaikan saja kami tampung, malah memberikan masukan terhadap kinerja kita. Kalo saya pribadi ya sudah baik MPC PP itu karena kegiatannya itu juga untuk masyarakat”

Pendapat ini selaras lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 15 November 2023, mengatakan bahwa:

“Citra masyarakat terhadap kami memang beraneka ragam mba, misal nya ada yang memberitakan kami kurang baik ya kita sebagai anggota MPC dilihat dulu berita nya seperti apa, kalo ada saran dan masukan kami terima, jika ada yang kurang baik berarti memang perlu ada evaluasi dari kami”

“ada yang mengatakan MPC PP itu melalukan pungutan dengan mengatasnamakan MPC PP atau memakai atribut, dari kami nanti akan memastikan dengan yang bersangkutan apabila ada yang di rugikan, dan kami memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan hal tersebut, karena MPC PP itu kan berhubungan dengan masyarakat, pemerintah juga mba hidup juga masih berdampingan dengan masyarakat jadi semampu kita saling menjaga dan menghargai”

Pandangan dari anggota mengenai persepsi masyarakat terhadap Organisasi Pemuda Pancasila, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPC PP Kabupaten Sukoharjo citra atau persepsi masyarakat memang bermacam-macam jika ada yang kurang baik dari MPC PP Kabupaten Sukoharjo akan menanggapi dengan baik dan menerima segala masukan serta

siap memberikan sanksi apabila anggota melakukan tindakan kurang baik serta dilakukan upaya perubahan dalam memperbaiki citra kurang baik tersebut.

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu, 15 November 2023, mengatakan bahwa:

“upaya yang kami lakukan dalam memperbaiki pandangan masyarakat jika ada yang kurang baik, pertama kami evaluasi terlebih dahulu dalam forum yang diikuti seluruh anggota, jika diperlukan dilakukan latihan kembali untuk memperkuat tujuan pembentukan MPC PP agar kembali ke tujuan awal sebagai Ormas yang berlandaskan Pancasila, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat seperti membantu jika ada bencana alam.”

Pendapat ini selaras lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 15 November 2023, mengatakan bahwa:

“menambahi dari bapak wakil ketua MPC PP Kabupaten Sukoharjo, kami membuka komunikasi terbuka kepada masyarakat bisa melalui media sosial kami, dan bisa bertemu langsung untuk berdiskusi dalam memberikan saran dan masukan kepada kami”

Upaya dari anggota untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap Organisasi Pemuda Pancasila yang kurang baik, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPC PP Kabupaten Sukoharjo membuka saran dan masukan secara terbuka untuk berkomunikasi melalui media sosial maupun bertemu sevara langsung, PP akan melakukan evaluasi kinerja anggota agar mengingat tujuan awal organisasi ini untuk memperbaiki pandangan masyarakat yang kurang baik.

3.2.2 Implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda pancasila. Di Kabupaten Sukoharjo, PP sebagai organisasi masyarakat bergerak dalam penanaman sikap nasionalisme dan kegiatan sosial masyarakat khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. PP memiliki bentuk keorganisasian yang menampilkan cerminan kualitas profesionalisme dan pengalaman organisasi serta memiliki semangat nasionalisme dan demokratis yang diterapkan kepada anggotannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPC PP Kabupaten Sukoharjo terdapat implementasi atau pelaksanaan kewarganegaraan yang baik pada Ormas PP ialah kegiatan-kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan umum, kepentingan masyarakat yang berlandaskan pancasila serta nasionalisme. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“alasan saya ikut bergabung menjadi anggota Pemuda Pancasila itu sederhana mba, selain mengisi waktu luang banyak juga manfaatnya relasi dari ikut MPC PP ini banyak mba, kegiatan-kegiatannya juga menarik dan bisa bantu masyarakat juga mbak.”

Pendapat ini selaras lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“kalo saya ikut MPC PP ini karena sering melihat kegiatan-kegiatan nya mbak, dari posko mudik yang ada di Telukan itu mbak biasanya selain itu karena ada tetangga juga yang bergabung jadi ikut juga, kalo di MPC PP ini kan gak mandang lulusan maupun usia ya mbak jadi bisa lebih mudah kalo bergabung”

Pendapat ini selaras dengan pernyataan BA selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“alasan saya ikut MPC PP ini yang pasti ingin menambah relasi ya mbak, jadi dikenal sama masyarakat juga mbak”

Implementasi dari anggota terhadap reposisi Organisasi Pemuda Pancasila berkaitan dengan konsep kewarganegaraan yang baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPC PP Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa alasan yang mendasari sebagian besar anggota untuk bergabung ke MPC PP Kabupaten Sukoharjo, diantaranya menambah relasi, mengisi waktu luang, menarik dari kegiatannya, serta tidak ada aturan yang membatasi untuk bergabung dari usia hingga spesifikasi pendidikan.

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“kegiatan-kegiatan di MPC PP Kabupaten Sukoharjo ini banyak mbak, kalo kegiatan inti saja ada diklat anggota, upacara hari besar nasional, aspirasi suara rakyat dan lain sebagainya mbak”

Pendapat ini selaras dengan pernyataan BA selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“kegiatan-kegiatan yang paling saya ingat saat mengikuti MPC PP ini mendirikan posko mudik di Telukan itu mbak, seru, menarik juga membantu para pemudik kadang ada yang tanya lokasi atau sekedar mampir untuk istirahat, selain itu ada penggalangan dana juga biasanya kita mencari dana di sekitar lampu merah lalu di sumbangkan kepada yang membutuhkan“

Pendapat lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Kalo MPC PP Kabupaten Sukoharjo itu kegiatan nya kurang lebih isinya untuk kepentingan masyarakat umum mba, seperti penyediaan ambulan gratis, siaga bencana untuk membantu masyarakat juga mba, donor darah karena kita bekerjasama juga dengan PMI “

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPC PP Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya kegiatan positif yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas sehingga secara tidak langsung anggota MPC PP Kabupaten Sukoharjo sudah memahami adanya kewarganegaraan yang baik dengan ikut serta di dalam kegiatannya.

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“makna kewarganegaraan yang baik menurut saya adalah bertanggung jawab secara pribadi dan masyarakat, nah dengan saya ikut menjadi bagian dari MPC PP Kabupaten Sukoharjo ini menurut saya sudah menjadi bagian warga negara yang baik mbak.”

Pendapat ini selaras dengan pernyataan BA selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“kewarganegaraan yang baik menurut saya ya itu mbak jadi warga negara yang tidak neko-neko, berbuat baik, taat aturan, tidak melanggar norma masyarakat seperti sudah menggambarkan kewarganegaraan yang baik ya.”

Pendapat lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“makna warga negara yang baik, kalo menurut saya mbak menjadi pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, kalo masih sekolahnya taat dengan aturan sekolah, sudah dewasa menunaikan hak nya seperti membayar zakat kalo bisa diimbangi dengan membantu orang lain, seperti itu mbak”



Gambar 2. Donor Darah MPC PP Kabupaten Sukoharjo

(Sumber: dokumentasi MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo)

Gambar menunjukkan anggota MPC PP Kabupaten Sukoharjo sedang melaksanakan Donor Darah bersama PMI Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kewarganegaraan yang baik menurut anggota Pemuda Pancasila sudah diresapi dan dijalankan dengan baik. Kegiatan positif yang menunjukkan adanya upaya yang baik kepada masyarakat serta kemauan sadar diri atas tugas dan tanggung jawab pribadi yang harus dilaksanakan sudah mencerminkan implementasi kewarganegaraan yang baik. Implementasi Kewarganegaraan yang baik menurut Pemuda Pancasila adalah bertanggungjawab secara pribadi, kepada masyarakat umum dan kepada Negara.

Di Kabupaten Sukoharjo, PP sebagai organisasi masyarakat bergerak dalam penanaman sikap nasionalisme dan kegiatan sosial masyarakat khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. PP memiliki bentuk keorganisasian yang menampilkan cerminan kualitas profesionalisme dan pengalaman organisasi serta memiliki semangat nasionalisme dan demokratis yang diterapkan kepada anggotanya. Pemuda Pancasila memiliki tujuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengabdikan anggotanya kepada bangsa dan negara demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang dilandasi nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPC PP Kabupaten Sukoharjo terdapat implementasi atau pelaksanaan kewarganegaraan yang baik pada Ormas PP ialah kegiatan-kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan umum, kepentingan masyarakat yang berlandaskan Pancasila serta nasionalisme.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan yang terkait kewarganegaraan yang baik itu kan jika dilihat dari pedoman MPC PP yang menegdepankan nasionalisme dan pasti berlandaskan Pancasila, terkait dengan hal tersebut sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan kita mbak. Dari keanggotaan saja sudah terlihat di MPC PP Kabupaten Sukoharjo itu ada SAPMA, Srikandi MPC itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa serta Srikandi itu yang berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan wanita.”

Pendapat ini selaras dengan pernyataan BA selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan di MPC PP Kabupaten Sukoharjo itu sebenarnya banyak mbak, tapi ada juga yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Kalau kegiatan rutin itu donor darah, kebersihan lingkungan, posko bencana, posko mudik, pengamanan

wilayah atau kegiatan tertentu, kami juga menyediakan ambulan gratis mbak jika ada yang membutuhkan.’

Pendapat lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Kegiatan tak terduga juga ada mbak dari MPC PP maksudnya yang tidak terjadwal, seperti adanya bantuan kampanye yang melibatkan anggota MPC PP dari kami, karena sudah menjadi rahasia umum jika suatu organisasi itu banyak suaranya yang bisa di ajak untuk menawal suatu pemilu, taori itu juga di pertimbangkan dari kami di lihat dari visi misi bakal calon nya juga mbak mumpuni dalam memimpin atau tidak. Karena harus sesuai dengan pedoman kami yaitu nasionalisme, berlandaskan Pancasila serta kesejahteraan masyarakat.”

Pendapat ini selaras dengan pendapat yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Iya betul mbak, ada kegiatan pemerintahan juga yang terlibat seperti penyampaian aspirasi dari masyarakat yang di tampung kami untuk di sampaikan kepada pemerintah dalam kegiatan tertentu, bisa jugakegiatan santai saat ber silaturahmi di kegiatan lain.”

Pendapat lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Kalo kegiatan kami ya mbak dalaam sebagai warga negara yang baik, secara pribadi ya membayar pajak, mematuhi undang-undang, berbuat baik serta menghargai sesama anggota organisasi itu juga termasuk lho mbak. “



Gambar 3. Pengumpulan dana bantuan sosial masyarakat Kabupaten Sukoharjo

(Sumber: dokumentasi peneliti 2023)

Gambar menunjukkan anggota MPC PP Kabupaten Sukoharjo sedang melaksanakan Pengumpulan dana bantuan sosial masyarakat Kabupaten Sukoharjo

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila MPC PP Kabupaten sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yaitu Pancasila, Nasionalisme dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang baik dengan diiringi perilaku anggota yang sudah mencerminkan warga negara yang baik diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat yang buruk terhadap Ormas PP.

3.2.3 Kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila. Dalam melaksanakan sebuah aturan dan kegiatan tentu tidak semuanya berjalan dengan lancar begitu pula dengan pelaksanaan implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila. Dalam pelaksanaan implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila masih terdapat hambatan dimana hambatan itu berasal dari anggota itu sendiri maupun dari lingkungan masyarakat. Biasanya hambatan dari siswa ini seperti pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah di terapkan di MPC PP Kabupaten Sukoharjo.

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Kalo kendala itu sudah biasa terjadi ya mbak, dari anggota itu ada yang tidak pernah datang, ada yang terlambat datang jika ada acara, tidak berkomitmen dalam melaksanakan tugas ya seperti itu lah kendala dalam organisasi ya mbak”

Pendapat ini selaras dengan pernyataan G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Wah kalo dari anggota pasti ada mbak setiap pertemuan itu pasti ada saja yang tidak ber atribut lengkap, terlambat, tidur saat acara, seperti pada umumnya aja sih mbak.”

Pendapat lain disampaikan oleh BA selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Kalo hambatan selain dari anggota biasanya juga ada dari masyarakat mba, misal kita sedang melakukan kegiatan itu ada juga yang tidak mengizinkan.”

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa:

“Menurut saya itu sudah biasa ya mbak selagi kita bisa menangani dengan baik tidak menjadi masalah, karena kegitan dari MPV PP Kabupaten Sukoharjo itu tergolong besar dengan anggota yang banyak pasti ada kerisauan dari masyarakat yang tidak mengizinkan.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemui pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang ada disana yaitu mereka telat datang di markas MPC PP saat ada kegiatan. Pelanggaran anggota yang telat ini hanya 1 sampai 2 orang saja. Jika ada temuan pelanggaran seperti ini biasanya diberikan sanksi atau hanya tegursan jika masih bisa di perbaiki.

3.2.4 Solusi dari kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila. Solusi yang diberikan oleh MPC PP Kabupaten Sukoharjo jika menemui hambatan, ialah dengan berdiskusi, menyelesaikan secara kekeluargaan serta mengevaluai ke anggotaan. Apabila hambatan terjadi dilakukan oleh anggota maka diberikan sanksi disiplin atau teguran. Selain memberikan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti mengadakan donor darah, mitigasi bencana, mendirikan posko mudik, dan lain sebagainya.

3.3 Pembahasan

Kewarganegaraan yang baik merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda sebagai tonggak bangsa yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, sikap warga negara yang diharapkan seperti kritis dalam berkehidupan, kreatif, memiliki ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hidup sebagai warga negara (Ayuning L. F. & Dewi, 2021). Membentuk karakter kewarganegaraan yang baik pada generasi muda bisa dilakukan dalam pendidikan, keluarga maupun dengan mengikuti organisasi masyarakat, karakter memang dibentuk di keluarga, dikembangkan di sekolah, hingga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Sulianti., 2019).

Bentuk implementasi kewarganegaraan yang baik pada Ormas PP dapat dilihat melalui berbagai program yang dijalankan dan diterapkan di kehidupan masyarakat, khususnya daerah Kabupaten Sukoharjo. Berbagai program kemasyarakatan yang dijalankan oleh Ormas PP seperti adanya kegiatan donor darah, kebersihan lingkungan, membantu dalam kegiatan sosial, menyediakan kendaraan yang digunakan untuk korban kecelakaan maupun bencana alam, serta membantu mengatur jalan apabila diperlukan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan.

Sebagai warga negara diperlukan mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kewarganegaraan terlebih dahulu, penting untuk mengetahui politik, moral, hukum dalam berkehidupan di masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya sebagai warga negara di harapkan memiliki keterampilan intelektual dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehingga pada akhirnya hasil pembelajaran yang berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di berikan disekolah dapat membentuk moral dan karakter yang kuat dan dapat diterapkan di kehidupannya sebagai cerminan warga negara yang baik dengan karakter religius, adil, jujur, toleransi dan demokratis (Ikhtiarti ., 2019).

Westheimer dan Kahne (Westheimer., 2002) mengelompokkan jenis kewarganegaraan yang baik yaitu *personally responsible*, *participatory citizens*, dan *justice-oriented citizen*. Dalam pengelompokan tersebut memiliki ciri-ciri berbeda antara satu dengan lainnya yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara demokratis yang ikut terlibat dalam mengatasi masalah sosial yang ada pada kehidupannya. Karena setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup. Maka setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna bagi negaranya, serta mampu mengatasi perkembangan dan perubahan sosial di masa depan. Maka dari itu diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral dan budaya. Nilai tersebut berperan sebagai pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Muhammad., 2019).

Tabel 2. Ringkasan Temuan

Peran	Bukti kegiatan	Gambaran umum	Jenis implementasi Kewarganegaraan yang baik
Kegiatan keorganisasian	Diklat Keanggotaan	Kegiatan yang dilakukan di awal keikutsertaan anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota baru.	Warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi
	Pelatihan Keselamatan Bencana	Kegiatan yang di selenggarakan dalam rangka menyiapkan anggota agar siap menghadapi bencana dan dapat membantu masyarakat umum.	Warga negara yang berpartisipasi
	Donor Darah	Kegiatan rutin yang dilakukan anggota yang bekerjasama dengan PMI demi	Warga negara yang berpartisipasi

	tersedianya darah apabila diperlukan.	
Evaluasi Keorganisasian	Kegiatan rutin yang dilakukan setiap selesai melaksanakan program kerja untuk membuat perbaikan serta menilai eektivitas dari program tersebut.	Warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi
Posko Mudik	Mendirikan posko mudik bertujuan sebagai tempat istirahat bagi para pemudik yang biasa dilaksanakan saat hari raya keagamaan, maupun tahun baru.	Warga negara yang berpartisipasi
Bakti Sosial	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan paket sembako.	Warga negara yang berpartisipasi
Penyedia Layanan Ambulan Gratis	Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat umum yang membutuhkan layanan ambulan gratis.	Warga negara yang berpartisipasi
Pertemuan Rutin	Kegiatan keanggotaan organisasi untuk membicarakan terkait program	Warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi

	kerja dan evaluasi organisasi.	
Upacara	Dilaksanakan pada peringatan hari besar nasional.	Warga negara yang berorientasi pada keadilan
Penggalangan dana bencana	Kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi masyarakat yang sedang tertimpa musibah.	Warga negara yang berpartisipasi

Ormas PP (Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila) dijadikan sebagai contoh oleh masyarakat sebagai organisasi yang menjunjung nilai pancasila, PP memiliki eksistensi dalam kehidupan bernegara serta mengembangkan potensi secara mandiri dan profesionalitas (PUTRI & NPM.1531040129, 2019). Ormas PP membahas dan menjalankan beberapa persoalan mengenai kondisi kehidupan masyarakat secara internal maupun eksternal mengangkat beberapa persoalan tentang kondisi kehidupan bangsa baik secara internal maupun eksternal.

Pemuda Pancasila sering dimanfaatkan untuk mengumpulkan massa dari *internal* anggota maupun *eksternal* anggota Pemuda Pancasila. Hal ini dikarenakan Organisasi Masyarakat dianggap memiliki peran dalam kehidupan sosial dan mempunyai pengaruh dalam memberikan massa kepada calon kepala daerah dalam pesta demokrasi. Peran Organisasi Masyarakat dalam pesta demokrasi yang berhubungan erat dengan politik, karena dianggap mampu membantu penyalur aspirasi masyarakat sebagaimana tujuan dari Pemuda Pancasila itu sendiri yang dilakukan dengan cara musyawarah, demonstrasi, hubungan pribadi maupun perwakilan dalam memberikan aspirasi. Selain itu Pemuda Pancasila juga dapat berperan sebagai pengalihan isu politik yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan saat pemilihan berlangsung (Slametto, 2016). Pemuda Pancasila di Kabupaten Sukoharjo memiliki peran sendiri dalam bidang politik yang terlihat dari berbagai pandangan yang berdasarkan pada ideologi pancasila dengan memberikan program kepada masyarakat (Sagala, 2018).

Pemuda Pancasila sering melakukan kegiatan sosial, politik dilingkungan masyarakat hampir setiap bulannya (Slametto, 2016). Kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat mulai paham akan adanya tujuan Pemuda Pancasila yang berlainan adanya tindakan premanisme sehingga dibutuhkannya perubahan persepsi dari masyarakat. Bentuk tindakan pendekatan Pemuda Pancasila ialah dengan menghilangkan bentuk atau aksi

premanisme dalam lingkungan masyarakat. Namun, masih terdapat pro-kontra dengan adanya Pemuda Pancasila karena sudah melekatnya persepsi masyarakat yang kurang baik di kalangan masyarakat (Syahputra, 2019).

Di Kabupaten Sukoharjo, PP sebagai organisasi masyarakat bergerak dalam penanaman sikap nasionalisme dan kegiatan sosial masyarakat khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. PP memiliki bentuk keorganisasian yang menampilkan cerminan kualitas profesionalisme dan pengalaman organisasi serta memiliki semangat nasionalisme dan demokratis yang diterapkan kepada anggotanya. Pemuda Pancasila memiliki tujuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengabdikan anggotanya kepada bangsa dan negara demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang dilandasi nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Kegiatan organisasi PP yang terbentuk dalam satu organisasi yang memiliki persamaan tujuan. Narasumber tidak mengikuti kegiatan organisasi lain selain PP. Berbagai program kemasyarakatan yang dijalankan oleh Ormas PP seperti adanya kegiatan donor darah, kebersihan lingkungan, membantu dalam kegiatan sosial, menyediakan kendaraan yang digunakan untuk korban kecelakaan maupun bencana alam, serta membantu mengatur jalan apabila diperlukan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan.

Pengaruh PP dalam kewarganegaraan yang baik menurut partisipasinya, memberikan dampak yang baik dari anggotanya kepada keluarga dan masyarakat, adanya berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PP memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi penting sebagai pengeksekusi dan memberikan ekspresi dalam pembentukan kebijakan daerah didukung oleh PP sebagai penyalur aspirasi masyarakat (Maryani ., 2018).

Ormas PP tidak hanya membuat kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat saja, melainkan dengan melibatkan unsur politik serta keikutsertaannya dalam kegiatan pemerintah daerah seperti memberikan aspirasi serta pandangan politik kepada pemerintah, memberikan aspirasi yang dipercayakan oleh masyarakat agar di salurkan kepada pemerintah mengenai infrastruktur, pendidikan, kesehatan dll.



Gambar 4. Pemberian Aspirasi Oleh Srikandi Pemuda Pancasila kepada Pemerintah Daerah

Sumber: Dokumentasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo

Keterlibatan tokoh politik dalam Pemuda Pancasila di Sukoharjo terlihat pada acara-acara yang diselenggarakan Pemuda Pancasila maupun pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran tokoh politik yang terlihat dari gambar diatas salah satunya adalah Bupati Kabupaten Sukoharjo Hj. Etik Suryani, SE., MM yang hadir pada saat acara Pemberian Aspirasi oleh Pemuda Pancasila di Langenharjo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Hal ini memperkuat adanya pengaruh dari Pemuda Pancasila dalam keterlibatannya di lingkungan politik maupun pemerintah, keduanya saling berkeatain dengan tujuan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo. Penelitian ini berkaitan dengan Progdi PPKn yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik (*good citizenship*) dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keorganisasian masyarakat serta memberi gambaran mengenai karakter yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual maupun rasa cinta kepada tanah air. Pemuda Pancasila dalam perannya sebagai Organisasi Masyarakat sering dilibatkan dalam dunia politik. Terlihat dari terlibatnya Pemuda Pancasila di dalam pesta demokrasi seperti pemilu maupun pilkada. Pemuda Pancasila keterlibatannya digunakan oleh partai politik maupun calon kepala daerah sebagai alat mobilisasi penggerak massa dari kader Pemuda Pancasila untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon yang terlibat. Tak jarang anggota maupun pengurus dari Pemuda Pancasila dilibatkan sebagai calon kepala daerah dan diusung oleh partai tertentu sebagai keputusan organisasi dan kepentingan elit yang ada di daerah tersebut (Yando., 2019).

Adanya partisipasi politik serta terlibatnya PP dalam kegiatan masyarakat seperti kebersihan lingkungan, donor darah, posko arus mudik dan penyedia kendaraan sosial dapat disimpulkan bahwa PP sudah mencerminkan kewarganegaraan yang baik. Menurut (Westheimer et al., 2002) dalam pengelompokannya jenis warga negara yang baik PP sudah termasuk dalam *Personally responsible dan participatory citizens* (warga negara yang bertanggung jawab

secara pribadi dan warga negara partisipasif). Hal ini dibuktikan dengan anggota PP yang sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia serta ikut serta membantu kegiatan masyarakat sesuai dengan pedoman Pancasila sebagai ideologi bangsa.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemuda Pancasila mengimplementasikan kewarganegaraan yang baik dalam organisasinya ialah bagaimana anggota menjalankan tugasnya sebagai organisasi masyarakat yang berlandaskan Pancasila dengan baik dan benar serta mengikuti norma yang berlaku di masyarakat, tidak melanggar peraturan dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
2. Pemuda Pancasila termasuk dalam warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi dan warga negara partisipasif yang dibuktikan dengan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang ikut serta membantu kegiatan masyarakat dan keterlibatannya di lingkungan politik dengan pedoman Pancasila sebagai ideologi bangsa.
3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada organisasi pemuda Pancasila. Kendala yang dihadapi anggota Pemuda Pancasila ialah terdapat stigma masyarakat yang memberikan penilaian kurang baik kepada anggota Pemuda Pancasila selain itu dari anggota terkait ke disiplin.
4. Solusi dari kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada organisasi pemuda. Memberikan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti mengadakan donor darah, mitigasi bencana, mendirikan posko mudik, dan lain sebagainya. Memperbaiki citra dengan berperilaku baik dan santun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Berbasis Agama, Budaya, Dan Sosiologi. *Al-Afkar*, 4(1), 181–202.
- Affan, I. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Lmu Hukum*, 6(1), 127–138. [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume 6 N](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume%206%20N)
- Alvira, S., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda sebagai Agent of Change. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9201–9207.
- Andhini, N. F. (2017). Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- angga, cucu suryana, ima nurwahidah, D. (2022). *Jurnal basicedu*. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>

- Artanti, F., & Lestari, T. K. (2017). Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Matematika Siswa Dengan Menggunakan Model Discovery Learning Di Man 3 Yogyakarta. Konferensi Nasional Penelitian Matematika Dan Pembelajarannya II (KNPMP II), 18 Maret 2017, 290–300.
- Ayuning L. F., R. P., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Generasi Muda Sebagai Smart and Good Citizen Di Era Disrupsi. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 79–92. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1169>
- Baiq Hadia Martanti. (n.d.). sosiologi pendidikan dalam pembentukan karakter (studi sosiologi).
- Bowen, S. A. (2019). *Metode Penelitian. An Integrated Approach to Communication Theory and Research*, Third Edition, 27–35.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Cummings, & Thomas G. (2005). *Handbook of Organization Development Publications* Los Angeles, London, New Delhi Singapore Contents.
- Dewi, D. A., Hamid, S. I., Asyari, D., Setiawati, R., & Istiqomah, Y. Y. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mewujudkan Identitas Dan Integritasi Nasional. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5221–5226. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1607>
- Erick, M. C. J., Miranda, G., Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Instituto Mexicano del Seguro Social, Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., ... Faizi, M. F. (2016). Data Ormas-LSM Indonesia. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetc
- Fariz, M. W. (2015). Politik Balas Budi : Hubungan Pemuda Pancasila dan Demokrat dalam Mobilisasi Massa Pada Pilkada Surabaya tahun 2015. 1–13.
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hariyanto. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 95–100. <https://doi.org/10.51878/learning.v1i1.205>
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik Di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Ibrohim, I., Mansyur, S., Syah, M., Ruswandi, U., Uin, P., Gunung, S., & Bandung, D. (2020). Jurnal Educatio FKIP UNMA. *Ejournal.Unma.Ac.Id*, 6(2), 548–560. <https://doi.org/10.31949/educatio.v6i2.594>
- Ikhtiarti, E., Rohman, Adha, M., & Yanzi, H. (2019). Membangun Generasi Muda Smart and Good Citizenship melalui Pembelajaran PPKn menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Universitas Lampung*, 1, 4–12. <http://repository.lppm.unila.ac.id/13316/>
- Jannah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat Abad-21. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 931–936. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1055>

- Jati, W. R. (2021). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. The Habibie Center THC Insights, 27, 6. www.habibiecenter.or.id
- Kirom, A. (2017). Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran. Al Murabbi, 3(1), 69–80. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/893>
- Kodiyat MS, B. A., & Sinaga, E. I. M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 160–174. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>
- Kurniasari, A. dkk. (2020). Pendidikan guru sekolah dasar fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah surakarta 2013. Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian, 6(3), 1–8. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/PD>
- Martono. (2017). sejarah pemuda pancasila. <https://www.pemudapancasilajateng.or.id/pp/pages/sejarah-pemuda-pancasila>
- Maryani, H., & Nasution, A. (2018). Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Persepektif Hukum Internasional dan Ekonomi Islam). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147>
- Miguel, J. F. S., González, M., Gascón, A., Moro, J., Hernández, J. M., Ortega, F., Jiménez, R., Guerras, L., Romero, M., Casanova, F., Sanz, M. A., Sanchez, J., Portero and, J. A., & Orfao, A. (1992). Lymphoid subsets and prognostic factors in multiple myeloma. British Journal of Haematology, 80(3), 305–309. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.1992.tb08137.x>
- Moha/, D. S. & M. I. (2015). Definisi Penelitian Kualitatif Penelitian. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Muhammad, A., Nunuk, S., & Tri, A. D. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) sebagai Sarana Mewujudkan Warga Negara yang Beradab (Good Citizenship). Seminar Nasional Pendidikan Pengembangan Kualitas, 66–72.
- Nuradhawati, R. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila Dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma, 3(2), 140–150. <https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260>
- Nurismalatri, N., Pratama, Y., Aesah, S., Prasetyo, D., & Rahmadania, S. . N. (2020). Wujud Nyata Peran Pemuda Dan Organisasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Di Masa Pandemi Covid 19. Dedikasi Pkm, 2(1), 26. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i1.8478>
- Nurmalisa, Y., Mentari, A., & Rohman, R. (2020). Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Civic Conscience. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn, 7(1), 34–46. <https://doi.org/10.36706/jbti.v7i1.10082>
- Oktavia Fairy, S. N. P., Yudana, M., & Hendra Divayana, D. G. (2019). Kontribusi Gaya Kepemimpinan Transformasional, Etos Kerja Guru, Kepuasan Kerja, dan Budaya Organisasi Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMPK 1 Harapan Denpasar. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, 10(2), 125–131. <https://doi.org/10.23887/japi.v10i2.2799>
- Palinggi, S., & Prayogyandarini, P. M. (2020). Potensi Penyalahgunaan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Fiktif dalam Masyarakat Indonesia. Pamator Journal, 13(1), 74–80. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6936>
- Pancasila, O. P. (n.d.). musyawarah besar pemuda pancasila. 1–48.
- Pancasila, P. (n.d.). AD ART PEMUDA PANCASILA. <https://pemudapancasila.net/wp-content/uploads/2019/08/2019-AD-ART-FINAL-BESAR.pdf>
- Priyatna, M. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam, 5(10), 1311–1336. <https://doi.org/10.30868/ei.v5i10.6>

- Probosiwi, R. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Keserasian Sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4), 389–400.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2017). *Desain Penelitian Studi Kasus*. 1–15.
- PUTRI, D. A., & NPM.1531040129. (2019). Peran Pemuda Pancasila dalam menanamkan sikap nasionalisme terhadap masyarakat kecamatan Langkapura kota Bandar Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/7851/1/SKRIPSI PDF.pdf>
- Rochim, A., & Andri, M. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jomban*, 7(1), 1–14. <http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/article/view/130>
- Rony, R. (2021). Urgensi Manajemen Budaya Organisasi Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(1), 98–121. <https://doi.org/10.31538/tijie.v2i1.26>
- Sagala, S. T. P. (2018). Political Participation of the Sapma Pemuda Pancasila Organization in Central Java Governor Election 2018. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Slametto. (2016). Kajian Teori Dan Kerangka Pemikiran a. Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April, 5–24.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suhada. (2020). sosiologi pendidikan dalam pembentukan karakter (Sudut Pandang Sosial). *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 113–121. doi.org/10.36670/alaman.v2i02.20
- Sulfemi, W. B. (2019). Penerapan model pembelajaran discovery learning meningkatkan motivasi dan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan. ... Pancasila Dan Kewarganegaraan. <http://www.jurnal.stkipgritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/1021>
- Sulianti, A., Safitri, R. M., & Gunawan, Y. (2019). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal dalam Membangun Karakter Generasi Muda Bangsa. *Integralistik*, 30(2), 100–106. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v30i2.20871>
- Syahputra, B. D. (2019). persepsi masyarakat terhadap organisasi sosial kepemudaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 7, 1–118.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Thohir, M. (2017). Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4039>
- Treviño, E., Carrasco, D., Claes, E., & Editors, K. J. K. (2021). Good Citizenship for the Next Generation: A Global Perspective Using IEA ICCS 2016 Data. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED615192&site=ehost-live>
- Westheimer, A., Westheimer, J., & Kahne, J. (2002). Document Resume Ed 468 290 Ea 031 856 What Kind of Citizen? the Politics of Educating for Democracy.
- Yando, A. P., Muradi, M., & Ali, Y. (2019). Strategi Organisasi Kepemudaan Sapma Pemuda Pancasila DKI Jakarta Dalam Kontra Radikalisme. *Peperangan Asimetrik*, 65–80. <http://139.255.245.7/index.php/PA/article/view/369>
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia. *INTERAKTIF Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–28. <https://interaktif.ub.ac.id>